

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)

**PRINSIP DASAR PENYUSUNAN DAN
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BANK INDONESIA
(PDP2LK)**

PENGANTAR

Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (Komite Penyusun KAKBI) telah menyetujui Prinsip Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Indonesia (PDP2LK) pada rapat tanggal 29 Oktober 2012.

Jakarta, 29 Oktober 2012

Dewan Pengarah Komite Penyusun KAKBI

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Harti Haryani	Wakil Ketua
Ardhayadi M.	Anggota
Hilzahra Pheni	Anggota
Marsuki	Anggota
Sidharta Utama	Anggota
Slamet Sugiri	Anggota
Chaerul Djakman	Anggota
Jan Hoesada	Anggota
Amir Abadi Jusuf	Anggota
Kusumaningsih Angkawijaya	Anggota

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN	01-27
Tujuan dan Peranan	02-04
Ruang Lingkup	05-11
Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia	12-27
Tujuan Bank Indonesia	14-17
Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia.....	18-22
Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia.....	23
Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen.....	24
Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia...	25-27
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA	28-35
Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia	30-34
Catatan dan Skedul Tambahan	35
ASUMSI DASAR AKUNTANSI	36-38
Dasar Akrual	36
Kelangsungan Hidup	37
Periodisasi	38
KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN	39-63
Dapat Dipahami	40
Relevan.....	41-46
Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	43
Materialitas	44-45
Ketepatan Waktu.....	46
Andal	47-54
Pertimbangan Sehat	49
Penyajian Jujur	50-51
Substansi Mengungguli Bentuk.....	52
Netralitas.....	53
Kelengkapan.....	54
Dapat Dibandingkan.....	55-58
Kendala Informasi yang Relevan dan Andal	59-62
Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.....	59
Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif	60-61

Keterbatasan Nilai Prediksi.....	62
Penyajian Wajar	63
UNSUR LAPORAN KEUANGAN	64-101
Posisi Keuangan	66-87
Aset	70-76
Liabilitas	77-87
Surplus/Defisit.....	88-101
Penghasilan.....	93-97
Beban.....	98-101
PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN.....	102-123
Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia.....	105-107
Keandalan Pengukuran	108-110
Pengakuan Aset	111-112
Pengakuan Uang dalam Peredaran	113
Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank Indonesia.....	114
Pengakuan Selisih Revaluasi	115
Pengakuan Modal	116
Pengakuan Penghasilan	117-118
Pengakuan Beban.....	119-123
PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN	124-127

1 **PENDAHULUAN**

2
3 01. Kerangka dasar pelaporan keuangan Bank Indonesia diatur
4 dalam Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
5 (PDP2LK) sesuai dengan Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia
6 (PDGGBI) Nomor 14/10/PDG/2012 tanggal 04 Mei 2012 tentang Kerangka
7 Dasar Penyusunan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia
8 (KDPKAK-BI).

9
10 **Tujuan dan Peranan**

11
12 02. Prinsip dasar ini digunakan sebagai acuan bagi:

- 13 (a) komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia,
14 dalam pelaksanaan tugasnya;
- 15 (b) manajemen Bank Indonesia, untuk mengatasi masalah akuntansi
16 keuangan yang belum diatur dalam pernyataan kebijakan akuntansi
17 keuangan Bank Indonesia;
- 18 (c) pemeriksa laporan keuangan Bank Indonesia, dalam memberikan
19 pendapat apakah laporan keuangan Bank Indonesia telah disusun
20 sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan Bank
21 Indonesia; dan
- 22 (d) para pengguna laporan keuangan Bank Indonesia, dalam menafsirkan
23 informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia yang
24 disusun sesuai dengan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
25 Bank Indonesia.

26
27 03. Prinsip ini bukan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
28 sehingga tidak mendefinisikan pernyataan kebijakan akuntansi untuk
29 permasalahan pengukuran atau pengungkapan tertentu.

30
31 04. Dalam hal terdapat perbedaan mendasar antara prinsip dasar
32 dan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan, maka ketentuan pernyataan
33 kebijakan akuntansi keuangan harus diunggulkan relatif terhadap prinsip
34 dasar ini. Meskipun demikian, berhubung prinsip dasar ini dimaksudkan
35 sebagai acuan bagi komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank
36 Indonesia dalam pengembangan pernyataan kebijakan akuntansi keuangan
37 pada masa depan dan dalam peninjauan kembali terhadap pernyataan
38 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku, maka banyaknya perbedaan
39 mendasar tersebut dapat diminimalkan dengan berjalannya waktu.

40
41 **Ruang Lingkup**

42
43 05. PDP2LK merupakan prinsip-prinsip yang mendasari perlakuan
44 akuntansi atas transaksi Bank Indonesia yang bersifat konvensional dan
45 unik. Prinsip yang mendasari perlakuan akuntansi untuk transaksi yang
46 bersifat konvensional, tetapi tidak unik, akan mengacu pada Kerangka

1 Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi
2 Keuangan (KDP2LK SAK) Umum. Prinsip yang mendasari perlakuan
3 akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah, tetapi tidak unik, akan
4 mengacu pada KDP2LK SAK Syariah, sedangkan prinsip yang mendasari
5 perlakuan akuntansi untuk transaksi yang bersifat syariah dan unik akan
6 mengacu pada pengaturan khusus yang disusun oleh komite penyusun
7 kebijakan akuntansi keuangan Bank Indonesia.

8
9 06. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat syariah adalah transaksi
10 yang dilaksanakan Bank Indonesia dengan berdasar pada prinsip-prinsip
11 syariah. Transaksi yang tidak memenuhi definisi tersebut dikategorikan
12 sebagai transaksi konvensional.

13
14 07. Transaksi Bank Indonesia yang bersifat unik adalah:

- 15 (a) transaksi yang hanya terdapat di Bank Indonesia sebagai bank sentral;
16 atau
17 (b) transaksi yang terdapat di entitas lain, tetapi dilakukan Bank Indonesia
18 dengan tujuan yang berbeda dengan entitas lain.

19
20 08. Prinsip dasar ini mencakup:

- 21 (a) tujuan laporan keuangan Bank Indonesia;
22 (b) asumsi dasar laporan keuangan Bank Indonesia;
23 (c) karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam
24 laporan keuangan Bank Indonesia; serta
25 (d) definisi, pengakuan, dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan
26 Bank Indonesia.

27
28 09. Prinsip dasar ini membahas laporan keuangan Bank Indonesia
29 untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*), yang selanjutnya
30 hanya disebut sebagai "laporan keuangan". Laporan keuangan disusun dan
31 disajikan sesuai dengan periode yang ditetapkan dalam ketentuan yang
32 mengatur Bank Indonesia. Beberapa diantara pengguna memerlukan dan
33 berhak untuk memperoleh informasi tambahan di samping yang tercakup
34 dalam laporan keuangan. Meskipun demikian, banyak pengguna sangat
35 bergantung pada laporan keuangan sebagai sumber utama informasi
36 keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan tersebut seharusnya disusun
37 dan disajikan dengan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Laporan
38 keuangan dengan tujuan khusus dan perhitungan yang dilakukan untuk
39 tujuan perpajakan tidak termasuk dalam prinsip dasar ini.

40
41 10. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan
42 keuangan. Laporan keuangan Bank Indonesia yang lengkap meliputi laporan
43 posisi keuangan, laporan surplus/defisit, catatan dan laporan lain, materi

1 penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan, serta
2 skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.

3
4 11. Prinsip dasar ini berlaku untuk laporan keuangan Bank
5 Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan laporan keuangan untuk
6 digunakan oleh pengguna yang mengandalkan laporan keuangan tersebut
7 sebagai sumber utama informasi keuangan Bank Indonesia.

8 **Lingkungan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia**

9
10
11 12. Lingkungan organisasi Bank Indonesia berpengaruh terhadap
12 karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia.

13
14 13. Ciri-ciri penting lingkungan Bank Indonesia yang perlu
15 dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan
16 keuangan adalah sebagai berikut:

- 17 (a) tujuan Bank Indonesia;
18 (b) hubungan tujuan dan transaksi Bank Indonesia;
19 (c) fungsi dan tugas lain Bank Indonesia; dan
20 (d) kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen.

21 Tujuan Bank Indonesia

22
23
24 14. Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara
25 stabilitas nilai rupiah sesuai dengan amanat peraturan perundang-
26 undangan. Stabilitas nilai rupiah tersebut terutama dipengaruhi oleh
27 kebijakan moneter, fiskal, sektor keuangan, dan sektor riil. Karena
28 kewenangan Bank Indonesia tidak mencakup seluruh kebijakan tersebut,
29 pencapaian tujuan Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat dikendalikan
30 oleh Bank Indonesia.

31
32 15. Pencapaian tujuan Bank Indonesia, yaitu stabilitas nilai rupiah,
33 tidak dapat diukur dalam satuan mata uang. Oleh sebab itu, laporan
34 keuangan Bank Indonesia tidak dapat secara langsung digunakan untuk
35 mengukur pencapaian tujuan Bank Indonesia. Meskipun demikian, dampak
36 keuangan dari sebagian besar upaya atau kegiatan Bank Indonesia dalam
37 mencapai tujuannya dapat diukur dalam satuan mata uang sehingga
38 laporan keuangan Bank Indonesia dapat digunakan untuk mengukur
39 dampak keuangan dari upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia tersebut.
40 Untuk meningkatkan pemahaman pengguna atas informasi keuangan Bank
41 Indonesia, pengguna juga perlu membaca informasi nonkeuangan yang
42 memaknai informasi keuangan tersebut.

1 16. Laporan keuangan Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk
2 menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya dalam
3 mencapai tujuan Bank Indonesia. Seperti dijelaskan pada paragraf 15,
4 penggunaan sumber daya oleh Bank Indonesia dapat diukur dalam satuan
5 mata uang, tetapi pencapaian tujuannya tidak dapat diukur dalam satuan
6 mata uang. Oleh sebab itu, tidak dapat dilakukan perhitungan efisiensi
7 dalam ukuran perbandingan nilai keuangan dari tujuan terhadap biaya
8 untuk mencapai tujuan tersebut.

9
10 17. Manfaat yang diperoleh dari pencapaian tujuan Bank Indonesia
11 bukan hanya bersifat ekonomi, melainkan juga dapat bersifat sosial.
12 Keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara stabilitas
13 nilai rupiah dapat memberikan kepastian kepada dunia usaha,
14 meningkatkan kepercayaan publik domestik dan asing terhadap
15 perekonomian nasional, mencegah penurunan daya beli masyarakat akibat
16 inflasi yang tidak terkendali, dan pada akhirnya membantu menciptakan
17 kondisi dan lingkungan sosial yang lebih baik.

18 19 Hubungan Tujuan dan Transaksi Bank Indonesia

20
21 18. Dalam upaya mencapai tujuan seperti pada paragraf 14, Bank
22 Indonesia melaksanakan tugas yang menimbulkan transaksi yang berbeda
23 atau transaksi yang sama dengan tujuan berbeda jika dibandingkan dengan
24 entitas lain sehingga berdampak terhadap makna informasi keuangan dari
25 transaksi tersebut. Oleh sebab itu, informasi keuangan dari transaksi yang
26 dilakukan Bank Indonesia harus dimaknai dalam upaya pencapaian tujuan
27 Bank Indonesia.

28
29 19. Salah satu transaksi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan
30 tidak terdapat di entitas lain, baik entitas komersial maupun pemerintah,
31 adalah transaksi yang terkait dengan uang dalam peredaran. Uang dalam
32 peredaran merupakan liabilitas Bank Indonesia, tetapi tidak menunjukkan
33 klaim terhadap aset spesifik di Bank Indonesia dan tidak memiliki masa
34 jatuh tempo.

35
36 20. Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk memengaruhi uang
37 beredar dalam rangka mencapai tujuan stabilitas nilai rupiah. Kewenangan
38 tersebut menimbulkan liabilitas Bank Indonesia dalam mata uang rupiah
39 yang bukan merupakan sumber pendanaan melainkan instrumen kebijakan
40 Bank Indonesia. Hal ini berbeda dengan entitas komersial dan entitas
41 pemerintah.

42
43 21. Aset yang dimiliki Bank Indonesia terutama juga ditujukan
44 sebagai instrumen kebijakan, tidak seperti aset di entitas komersial yang

1 ditujukan untuk sumber daya produktif dalam menghasilkan laba, atau
2 seperti di entitas pemerintah sebagai sumber daya pendukung kegiatan dan
3 kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, penempatan dana yang dimiliki
4 entitas komersial ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu atau
5 pengendalian atas entitas lain. Penempatan dana yang dimiliki entitas
6 pemerintah juga ditujukan untuk memperoleh imbal hasil tertentu yang
7 kemudian digunakan sebagai sumber pendanaan atas aktivitas pemerintah.
8 Sementara itu, penempatan dana yang dimiliki Bank Indonesia terutama
9 digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk memengaruhi nilai rupiah.

10
11 22. Bank Indonesia sebagai bank sentral negara Republik Indonesia,
12 sesuai dengan tujuan yang diemban serta praktik yang lazim di bank sentral
13 negara lain, mengukur seluruh transaksi dan menyajikan laporan
14 keuangannya dalam mata uang negaranya yaitu rupiah. Namun, sebagai
15 bagian dari upaya Bank Indonesia dalam mencapai dan memelihara
16 stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia juga melaksanakan kebijakan untuk
17 memelihara komposisi cadangan devisa tertentu dengan jumlah yang
18 material terhadap total aset yang dimiliki Bank Indonesia. Keberadaan
19 cadangan devisa dalam valuta asing tersebut menimbulkan dampak
20 perhitungan nilai cadangan devisa ke dalam rupiah atau dampak
21 perhitungan transaksi antar-valuta asing ke dalam rupiah. Hal itu
22 menyebabkan laporan keuangan Bank Indonesia tidak dapat sepenuhnya
23 mencerminkan substansi ekonomi dari transaksi dan posisi cadangan devisa
24 Bank Indonesia.

25 26 Fungsi dan Tugas Lain Bank Indonesia

27
28 23. Bank Indonesia mengemban beberapa fungsi dan tugas lain yang
29 diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Fungsi dan tugas lain
30 tersebut menyebabkan Bank Indonesia melakukan kegiatan atau transaksi
31 tertentu yang memiliki dampak keuangan terhadap Bank Indonesia.
32 Informasi keuangan yang terkait dengan fungsi dan tugas lain Bank
33 Indonesia tersebut merupakan bagian dari laporan keuangan Bank
34 Indonesia.

35 36 Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen

37
38 24. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank
39 Indonesia merupakan lembaga negara independen serta bebas dari campur
40 tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang
41 secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1 Pengguna dan Kebutuhan Informasi Laporan Keuangan Bank Indonesia

2
3 25. Pengguna laporan keuangan Bank Indonesia adalah masyarakat.
4 Anggota masyarakat pengguna laporan keuangan Bank Indonesia tersebut
5 dapat dikelompokkan lebih lanjut menjadi wakil rakyat (Dewan Perwakilan
6 Rakyat), lembaga pemeriksa (Badan Pemeriksa Keuangan), pemerintah,
7 pelaku ekonomi, termasuk pelaku pasar keuangan domestik dan
8 internasional (termasuk bank-bank), pemberi pinjaman, bank sentral lain,
9 lembaga internasional, analis dan akademisi, serta anggota masyarakat
10 lainnya. Mereka menggunakan laporan keuangan Bank Indonesia untuk
11 memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda. Namun, pada
12 umumnya kebutuhan informasi pengguna atas laporan keuangan Bank
13 Indonesia adalah untuk menilai akuntabilitas manajemen Bank Indonesia
14 dalam mencapai tujuan yang telah diamanatkan dalam peraturan
15 perundang-undangan.

16
17 26. Kepentingan masyarakat menjadi acuan dalam menetapkan
18 ketentuan pelaporan keuangan Bank Indonesia. Namun, informasi yang
19 disajikan dalam laporan keuangan Bank Indonesia bersifat umum dan tidak
20 sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan informasi setiap pengguna.

21
22 27. Penanggung jawab utama dalam penyusunan dan penyajian
23 laporan keuangan Bank Indonesia adalah manajemen Bank Indonesia.
24 Manajemen juga berkepentingan dengan informasi yang disajikan dalam
25 laporan keuangan meskipun memiliki akses terhadap informasi manajemen
26 dan keuangan tambahan yang membantu dalam melaksanakan tanggung
27 jawab perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajemen
28 memiliki kemampuan untuk menentukan bentuk dan isi informasi
29 tambahan tersebut untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Meskipun
30 demikian, pelaporan informasi manajemen dan keuangan tambahan
31 tersebut berada di luar ruang lingkup prinsip dasar ini. Bagaimanapun juga,
32 laporan keuangan yang diterbitkan didasarkan pada informasi yang
33 digunakan manajemen tentang posisi keuangan dan surplus/defisit Bank
34 Indonesia.

35
36 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA**

37
38 28. Tujuan laporan keuangan Bank Indonesia adalah untuk
39 menunjukkan pencapaian manajemen atau pertanggungjawaban
40 manajemen dalam mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah, yang
41 meliputi informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
42 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

1 29. Laporan keuangan Bank Indonesia yang disusun untuk tujuan ini
2 memenuhi kebutuhan informasi sebagian besar pengguna. Akan tetapi,
3 laporan keuangan Bank Indonesia tidak menyediakan semua informasi yang
4 mungkin diperlukan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan karena
5 secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian pada masa
6 lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

7
8 **Posisi Keuangan dan Surplus/Defisit Bank Indonesia**

9
10 30. Penilaian akuntabilitas manajemen Bank Indonesia oleh
11 pengguna laporan keuangan Bank Indonesia memerlukan informasi tentang
12 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya. Para pengguna dapat
13 lebih memahami upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya melalui
14 gambaran umum dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
15 terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia.

16
17 31. Posisi keuangan Bank Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan Bank
18 Indonesia yang tercermin dalam sumber daya yang dikendalikan serta
19 struktur liabilitas Bank Indonesia. Informasi sumber daya yang dikendalikan
20 dan kemampuan Bank Indonesia dalam mengelola sumber daya pada masa
21 lalu serta informasi tentang struktur liabilitas Bank Indonesia berguna
22 untuk memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam mencapai dan
23 memelihara stabilitas nilai rupiah.

24
25 32. Surplus/defisit Bank Indonesia dipengaruhi oleh penghasilan dan
26 beban Bank Indonesia pada periode tertentu. Penghasilan Bank Indonesia
27 merupakan dampak keuangan pada periode tertentu, terutama dari
28 pengelolaan aset dalam rangka pencapaian tujuan Bank Indonesia.
29 Penghasilan Bank Indonesia bukan merupakan tujuan utama Bank
30 Indonesia. Beban Bank Indonesia terutama merupakan biaya pelaksanaan
31 kebijakan pada periode tertentu dalam rangka pencapaian tujuan Bank
32 Indonesia, dan umumnya tidak terkait dengan perolehan penghasilan. Oleh
33 sebab itu, informasi surplus/defisit Bank Indonesia tidak dimaksudkan
34 untuk mencerminkan kinerja keuangan Bank Indonesia.

35
36 33. Informasi dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia
37 terhadap posisi keuangan terutama disediakan dalam laporan posisi
38 keuangan. Informasi tentang dampak keuangan dari kebijakan Bank
39 Indonesia terhadap surplus/defisit Bank Indonesia terutama disediakan
40 dalam laporan surplus/defisit.

41
42 34. Komponen laporan keuangan Bank Indonesia saling terkait
43 karena mencerminkan aspek-aspek yang berbeda dari transaksi atau
44 peristiwa lain yang sama. Meskipun setiap laporan menyediakan informasi

1 yang berbeda satu sama lain, tidak ada yang hanya dimaksudkan untuk
2 memenuhi tujuan tunggal atau menyediakan semua informasi yang
3 diperlukan untuk memenuhi kebutuhan khusus pengguna. Sebagai contoh,
4 laporan surplus/defisit menyediakan gambaran yang tidak lengkap tentang
5 upaya Bank Indonesia dalam mencapai tujuannya, kecuali jika digunakan
6 dalam hubungannya dengan laporan posisi keuangan.

7 8 **Catatan dan Skedul Tambahan**

9
10 35. Laporan keuangan juga menampung catatan dan skedul
11 tambahan serta informasi lain. Laporan tersebut menampung informasi
12 tambahan, keuangan dan nonkeuangan, yang relevan untuk memahami
13 informasi yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan
14 surplus/defisit Bank Indonesia.

15 16 **ASUMSI DASAR AKUNTANSI**

17 18 **Dasar Akrual**

19
20 36. Untuk mencapai tujuan, laporan keuangan disusun atas dasar
21 akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada
22 saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar)
23 dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan
24 keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun
25 atas dasar akrual memberikan informasi kepada pengguna tidak hanya
26 transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas,
27 tetapi juga liabilitas pembayaran kas pada masa depan serta sumber daya
28 yang merepresentasikan kas yang akan diterima pada masa depan. Oleh
29 karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa
30 lalu dan peristiwa lain yang paling berguna bagi pengguna dalam
31 pengambilan keputusan.

32 33 **Kelangsungan Hidup**

34
35 37. Laporan keuangan Bank Indonesia disusun atas dasar asumsi
36 kelangsungan hidup Bank Indonesia. Peraturan perundang-undangan
37 menempatkan Bank Indonesia sebagai satu-satunya entitas yang
38 menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia.
39 Sehubungan dengan fungsi dan kewenangan tersebut, Bank Indonesia tidak
40 akan menghadapi masalah kelangsungan hidup.

1 **Periodisasi**

2

3 38. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Bank Indonesia
 4 dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga surplus/defisit Bank
 5 Indonesia dapat diukur dan posisi keuangan Bank Indonesia dapat
 6 ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

7

8 **KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN**

9

10 39. Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat
 11 informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat
 12 karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan
 13 dapat dibandingkan.

14

15 **Dapat Dipahami**

16

17 40. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat
 18 dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang
 19 disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
 20 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan Bank
 21 Indonesia serta dampaknya terhadap pelaporan keuangan Bank Indonesia,
 22 dan memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.
 23 Namun, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan
 24 keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa
 25 informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna
 26 tertentu.

27

28 **Relevan**

29

30 41. Agar informasi bermanfaat, informasi tersebut harus relevan
 31 untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan
 32 keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila dapat memengaruhi
 33 keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa
 34 masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau memperbaiki
 35 hasil evaluasi mereka pada masa lalu.

36

37 42. Peran informasi dalam prediksi (*predictive*) dan penegasan
 38 (*confirmatory*) berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, informasi struktur
 39 dan besarnya aset yang dimiliki Bank Indonesia bermanfaat bagi pengguna
 40 ketika mereka berusaha memprediksi kemampuan Bank Indonesia dalam
 41 mencapai tujuannya pada masa yang akan datang atau ketahanan Bank
 42 Indonesia terhadap tekanan perubahan perekonomian nasional, regional,
 43 dan global. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan

1 penegasan (*confirmatory role*) terhadap kebijakan yang telah diambil oleh
2 Bank Indonesia.

3 4 Kesesuaian dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia

5
6 43. Informasi yang relevan dalam pelaporan keuangan Bank
7 Indonesia adalah informasi yang mencerminkan upaya pencapaian tujuan
8 Bank Indonesia. Tujuan Bank Indonesia berdampak terhadap perbedaan
9 makna ekonomi dari transaksi sejenis yang terjadi di entitas lain. Oleh sebab
10 itu, makna informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
11 Bank Indonesia berbeda dengan makna informasi keuangan yang disajikan
12 dalam laporan keuangan entitas lain.

13 14 Materialitas

15
16 44. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.
17 Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk
18 menentukan relevansinya. Namun, dalam kasus lain, baik hakikat maupun
19 materialitas, keduanya dipandang penting.

20
21 45. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk
22 mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
23 memengaruhi keputusan pengguna yang diambil atas dasar laporan
24 keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang
25 dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan
26 (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Oleh karena itu,
27 materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah
28 daripada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar
29 informasi dipandang berguna.

30 31 Ketepatan Waktu

32
33 46. Informasi yang relevan adalah informasi yang disajikan tepat
34 waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan
35 keputusan.

36 37 **Andal**

38
39 47. Informasi juga harus andal (*reliable*) agar bermanfaat. Informasi
40 memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan,
41 kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian
42 yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang
43 secara wajar diharapkan dapat disajikan.

1 48. Suatu informasi boleh jadi relevan, tetapi jika hakikat atau
 2 penyajiannya tidak dapat diandalkan, penggunaan informasi tersebut secara
 3 potensial dapat menyesatkan. Sebagai contoh, jika keabsahan dan jumlah
 4 tuntutan atas penempatan dana Bank Indonesia pada surat berharga
 5 pemerintah asing dari suatu negara yang mengalami kesulitan keuangan
 6 masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi Bank Indonesia untuk
 7 mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam laporan posisi keuangan
 8 meskipun mungkin tepat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari
 9 tuntutan tersebut.

10
 11 Pertimbangan Sehat

12
 13 49. Penyusun laporan keuangan ada kalanya menghadapi
 14 ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian tersebut
 15 diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dan dengan
 16 menggunakan pertimbangan sehat (*prudence*) dalam penyusunan laporan
 17 keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat
 18 melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau
 19 penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan liabilitas atau beban tidak
 20 dinyatakan terlalu rendah. Meskipun demikian, penggunaan pertimbangan
 21 sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan
 22 tersembunyi atau penyisihan (*provision*) berlebihan, dan sengaja
 23 menetapkan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan
 24 liabilitas atau beban yang lebih tinggi sehingga laporan keuangan menjadi
 25 tidak netral yang mengakibatkan tidak memiliki kualitas andal.

26
 27 Penyajian Jujur

28
 29 50. Suatu informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi
 30 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat
 31 diharapkan untuk disajikan agar informasi tersebut dapat diandalkan.
 32 Sebagai contoh, laporan posisi keuangan harus menggambarkan dengan
 33 jujur transaksi serta peristiwa lain dalam bentuk aset dan liabilitas Bank
 34 Indonesia pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

35
 36 51. Informasi keuangan pada umumnya tidak luput dari risiko
 37 penyajian yang dianggap kurang jujur dari apa yang seharusnya
 38 digambarkan. Hal tersebut bukan disebabkan oleh kesengajaan untuk
 39 menyesatkan, tetapi lebih merupakan kesulitan yang melekat dalam
 40 mengidentifikasi transaksi serta peristiwa lain yang dilaporkan, atau
 41 dalam menyusun atau menerapkan ukuran dan teknik penyajian yang
 42 sesuai dengan makna transaksi dan peristiwa tersebut. Dalam kasus
 43 tertentu, pengukuran dampak keuangan dari suatu pos sangat tidak pasti
 44 sehingga Bank Indonesia tidak mengakuinya dalam laporan keuangan.

1 Sebagai contoh, meskipun pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat
 2 menghasilkan *goodwill* dalam bentuk kredibilitas Bank Indonesia, lazimnya
 3 sulit untuk mengidentifikasi atau mengukur *goodwill* tersebut secara andal.
 4 Namun, dalam kasus lain, pengakuan suatu pos tertentu tetap dianggap
 5 relevan dengan mengungkapkan risiko kesalahan sehubungan dengan
 6 pengakuan dan pengukurannya.

7 8 Substansi Mengungguli Bentuk

9
10 52. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi
 11 serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Dengan demikian, transaksi
 12 atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
 13 substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya.
 14 Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda
 15 dengan aspek formalitasnya, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas
 16 dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

17 18 Netralitas

19
20 53. Informasi harus ditujukan pada kebutuhan umum pengguna dan
 21 tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh
 22 ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa
 23 pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai
 24 kepentingan yang berlawanan.

25 26 Kelengkapan

27
28 54. Suatu informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam
 29 batasan materialitas dan biaya agar informasi tersebut dapat diandalkan.
 30 Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan
 31 informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan sehingga tidak dapat
 32 diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

33 34 **Dapat Dibandingkan**

35
36 55. Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan Bank
 37 Indonesia antar-periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi
 38 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran
 39 dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang
 40 serupa harus dilakukan secara konsisten antar-periode.

41
42 56. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif yang dapat
 43 diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi
 44 tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan

1 keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.
 2 Para pengguna harus dimungkinkan untuk dapat mengidentifikasi
 3 perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta
 4 peristiwa lain yang sama di Bank Indonesia dari satu periode ke periode lain.
 5 Ketaatan pada kebijakan akuntansi keuangan, termasuk pengungkapan
 6 kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Bank Indonesia, membantu
 7 pencapaian daya banding akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
 8 Indonesia.

9
 10 57. Kebutuhan terhadap daya banding tidak boleh menempatkan
 11 keseragaman semata-mata dan tidak seharusnya menjadi hambatan dalam
 12 memperkenalkan kebijakan akuntansi keuangan yang lebih baik. Bank
 13 Indonesia tidak perlu mempertahankan kebijakan akuntansi yang dipilih
 14 manajemen apabila yang tidak lagi selaras dengan karakteristik kualitatif
 15 relevansi dan keandalan. Bank Indonesia juga tidak perlu mempertahankan
 16 suatu kebijakan akuntansi yang dipilih manajemen jika ada alternatif lain
 17 yang lebih relevan dan lebih andal.

18
 19 58. Bank Indonesia perlu menyajikan informasi periode sebelumnya
 20 dalam laporan keuangan karena pengguna ingin membandingkan dampak
 21 keuangan dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi
 22 keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia antar-periode.

23 **Kendala Informasi yang Relevan dan Andal**

24 Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

25
 26
 27
 28 59. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan
 29 kendala yang pervasif (meluas) daripada karakteristik kualitatif. Manfaat
 30 yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya serta
 31 biaya yang mungkin timbul dari penyajian informasi tersebut (misalnya
 32 penyajian informasi tertentu dapat dimanfaatkan oleh pihak dan atau
 33 kepentingan tertentu sehingga menghambat upaya pencapaian tujuan Bank
 34 Indonesia atau menimbulkan kerugian bagi kepentingan publik). Meskipun
 35 demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang
 36 substansial. Biaya tersebut juga tidak harus ditanggung oleh pengguna
 37 informasi yang mendapat manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh
 38 pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi. Karena
 39 alasan itulah maka sulit untuk mengaplikasikan uji biaya-manfaat pada
 40 kasus tertentu. Komite penyusun kebijakan akuntansi keuangan Bank
 41 Indonesia, Bank Indonesia, dan para pengguna laporan keuangan Bank
 42 Indonesia harus menyadari kendala tersebut.

Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

60. Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan dalam praktik. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

61. Salah satu *trade-off* yang dapat terjadi adalah dalam upaya menyajikan informasi yang andal dan tepat waktu. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansi. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, manajemen sering kali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lain diketahui sehingga mengurangi keandalan informasi. Sebaliknya, jika pelaporan ditunda sampai seluruh aspek diketahui, informasi yang dihasilkan mungkin sangat andal, tetapi kurang bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam usaha mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, kebutuhan pengambil keputusan merupakan pertimbangan yang menentukan.

Keterbatasan Nilai Prediksi

62. Perubahan perekonomian nasional, regional, dan global berpengaruh terhadap kebijakan Bank Indonesia, kemampuan ekonomis sumber daya keuangan Bank Indonesia, serta dampak keuangan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Oleh sebab itu, daya prediksi dari informasi pada laporan keuangan Bank Indonesia sensitif terhadap perubahan situasi perekonomian tersebut. Pengguna harus menyadari keterbatasan nilai prediksi pada saat menggunakan laporan keuangan Bank Indonesia dalam mengambil keputusan.

Penyajian Wajar

63. Laporan keuangan Bank Indonesia menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, dampak keuangan dari kebijakan Bank Indonesia terhadap posisi keuangan dan surplus/defisit Bank Indonesia. Meskipun prinsip dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan kebijakan akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai

1 suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi
 2 semacam itu.

3
 4 **UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

5
 6 64. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari
 7 transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok
 8 besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar tersebut
 9 merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung
 10 dengan pengukuran posisi keuangan Bank Indonesia adalah aset dan
 11 liabilitas. Sementara itu, unsur yang berkaitan dengan surplus/defisit Bank
 12 Indonesia adalah penghasilan dan beban.

13
 14 65. Penyajian berbagai unsur ini dalam laporan posisi keuangan dan
 15 laporan surplus/defisit Bank Indonesia memerlukan proses subklasifikasi.
 16 Subklasifikasi unsur laporan keuangan akan meningkatkan kemampuan
 17 pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi keuangan Bank
 18 Indonesia.

19
 20 **Posisi Keuangan**

21
 22 66. Unsur posisi keuangan adalah aset dan liabilitas. Pos-pos ini
 23 didefinisikan sebagai berikut.

- 24 (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh Bank Indonesia sebagai
 25 akibat peristiwa masa lalu dan mencerminkan hak Bank Indonesia
 26 untuk memperoleh manfaat ekonomi dalam upaya mencapai dan
 27 memelihara stabilitas nilai rupiah yang berdampak ekonomi dan sosial
 28 kepada masyarakat dan perekonomian nasional.
 29 (b) Liabilitas adalah klaim kini terhadap Bank Indonesia dengan
 30 karakteristik yang berbeda-beda yang timbul dari peristiwa masa lalu.

31
 32 67. Definisi dari aset dan liabilitas mengidentifikasi ciri
 33 esensialnya, tetapi tidak mencoba untuk menetapkan kriteria spesifik yang
 34 perlu dipenuhi sebelum diakui dalam laporan posisi keuangan. Oleh sebab
 35 itu, definisi tersebut juga mencakup pos-pos yang tidak diakui sebagai
 36 unsur dalam laporan posisi keuangan karena tidak memenuhi kriteria untuk
 37 diakui seperti yang dibahas dalam paragraf 102 sampai dengan 123.
 38 Khususnya, harapan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan akan
 39 mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia harus cukup pasti untuk
 40 memenuhi kriteria probabilitas dalam paragraf 103 sebelum suatu aset atau
 41 liabilitas diakui.

1 68. Dalam penilaian apakah suatu pos memenuhi definisi unsur
2 laporan keuangan, perhatian perlu ditujukan pada substansi yang
3 mendasari serta realitas ekonomi, dan bukan hanya bentuk hukumnya.

4
5 69. Laporan posisi keuangan yang disusun menurut pernyataan
6 kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku dapat meliputi pos yang tidak
7 memenuhi definisi aset atau liabilitas. Meskipun demikian, definisi yang
8 dirumuskan dalam paragraf 66 akan mendasari peninjauan kembali
9 terhadap pernyataan kebijakan akuntansi keuangan yang berlaku pada
10 masa depan dan perumusan pernyataan kebijakan selanjutnya.

11
12 Aset

13
14 70. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank
15 Indonesia adalah potensi aset tersebut, baik secara langsung maupun tidak
16 langsung, digunakan dalam pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia untuk
17 mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Potensi tersebut dapat
18 berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas
19 Bank Indonesia. Manfaat tersebut dapat juga berbentuk sesuatu yang dapat
20 digunakan sebagai instrumen kebijakan atau berbentuk kredibilitas yang
21 dapat membantu keefektifan pencapaian tujuan.

22
23 71. Bank Indonesia menggunakan aset, terutama sebagai instrumen
24 pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, untuk mencapai dan memelihara
25 stabilitas nilai rupiah.

26
27 72. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset Bank
28 Indonesia dapat diperoleh melalui beberapa cara, misalnya aset dapat:

- 29 (a) digunakan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia;
30 (b) dipertukarkan dengan aset lain dalam pelaksanaan tugas Bank
31 Indonesia; dan
32 (c) digunakan untuk menyelesaikan liabilitas.

33
34 73. Banyak aset memiliki bentuk fisik. Namun, bentuk fisik tersebut
35 tidak esensial untuk menentukan eksistensi aset. Oleh karena itu, aset yang
36 tidak memiliki bentuk fisik merupakan aset bagi Bank Indonesia jika
37 memberikan manfaat ekonomi pada masa depan dan tiap-tiap aset tersebut
38 dikuasai Bank Indonesia.

39
40 74. Banyak aset, dihubungkan dengan hak menurut hukum,
41 termasuk hak milik. Dalam menentukan eksistensi aset, hak milik ada
42 kalanya tidak esensial. Meskipun kemampuan Bank Indonesia untuk
43 mengendalikan manfaat biasanya berasal dari hak menurut hukum, suatu

1 barang atau jasa dapat memenuhi definisi aset meskipun tidak dikuasai
2 berdasarkan hukum.

3
4 75. Aset Bank Indonesia berasal dari transaksi atau peristiwa lain
5 yang terjadi pada masa lalu. Bank Indonesia biasanya memperoleh aset
6 melalui pembelian, hibah, konversi aset ke aset lain, pengembangan sendiri,
7 atau berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan. Transaksi atau
8 peristiwa yang diharapkan terjadi pada masa depan tidak dengan sendirinya
9 memunculkan aset. Oleh karena itu, misalnya, maksud Bank Indonesia
10 untuk membeli aset tertentu tidak dengan sendirinya memenuhi definisi
11 aset.

12
13 76. Ada hubungan erat antara terjadinya pengeluaran dan timbulnya
14 aset, tetapi kedua peristiwa ini tidak harus terjadi bersamaan. Oleh karena
15 itu, apabila Bank Indonesia melakukan pengeluaran, peristiwa ini
16 memberikan bukti bahwa Bank Indonesia mengejar manfaat ekonomi, tetapi
17 belum merupakan bukti konklusif bahwa suatu barang atau jasa yang
18 memenuhi definisi aset telah diperoleh. Sama halnya dengan tidak adanya
19 pengeluaran yang bersangkutan tidak mengecualikan suatu barang atau
20 jasa memenuhi definisi aset dan dengan demikian terdapat kemungkinan
21 untuk diakui pencantumannya dalam laporan posisi keuangan. Sebagai
22 contoh, hibah yang diterima oleh Bank Indonesia memenuhi definisi aset.

23 24 Liabilitas

25
26 77. Liabilitas Bank Indonesia terutama terdiri dari uang dalam
27 peredaran, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia,
28 selisih revaluasi, modal, dan akumulasi surplus/defisit.

29
30 78. Uang dalam peredaran adalah uang rupiah yang dinyatakan
31 sebagai alat pembayaran yang sah yang tidak dalam penguasaan Bank
32 Indonesia. Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang
33 berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut,
34 dan menarik uang yang dimaksud dari peredaran.

35
36 79. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
37 mencerminkan potensi meningkatnya liabilitas lain dan/atau potensi
38 menurunnya sumber daya yang dimiliki Bank Indonesia pada masa depan
39 yang timbul dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia pada masa lalu.
40 Sebagai contoh, liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
41 Indonesia adalah instrumen moneter berbasis utang, baik rupiah maupun
42 valuta asing, giro bank, dan giro pemerintah di Bank Indonesia.

1 80. Karakteristik esensial dari liabilitas lainnya dari pelaksanaan
2 kebijakan Bank Indonesia adalah bahwa Bank Indonesia mempunyai
3 kewajiban (*obligation*) masa kini. Kewajiban adalah suatu tugas atau
4 tanggung jawab untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan
5 cara tertentu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai
6 konsekuensi kontrak mengikat atau peraturan perundang-undangan.
7 Namun, kewajiban juga dapat timbul dari substansi transaksi yang
8 memenuhi definisi liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
9 Indonesia.

10
11 81. Kewajiban kini berbeda dengan komitmen pada masa depan.
12 Keputusan manajemen Bank Indonesia untuk membeli instrumen keuangan
13 pada masa depan tidak dengan sendirinya menimbulkan kewajiban kini.
14 Kewajiban biasanya timbul hanya jika aset telah diserahkan atau Bank
15 Indonesia telah membuat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan untuk
16 membeli aset. Hakikat perjanjian yang tidak dapat dibatalkan berarti bahwa
17 konsekuensi ekonomi dari kegagalan untuk memenuhi kewajiban, misalnya,
18 karena adanya hukuman yang substansial, membuat Bank Indonesia
19 memiliki sedikit pilihan untuk mencegah pengeluaran sumber daya kepada
20 pihak lain.

21
22 82. Kewajiban kini Bank Indonesia dalam mata uang rupiah pada
23 umumnya diselesaikan dengan penggantian kewajiban tersebut dengan
24 kewajiban lain. Penyelesaian kewajiban kini Bank Indonesia dalam valuta
25 asing pada umumnya dilakukan dengan penyerahan valuta asing.
26 Penyelesaian kewajiban mungkin saja dilakukan dengan pembayaran uang
27 rupiah. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara lain, seperti lembaga
28 pemberi pinjaman membebaskan atau membatalkan haknya.

29
30 83. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
31 timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Sebagai contoh, penerbitan
32 instrumen kebijakan dalam bentuk instrumen utang menimbulkan liabilitas
33 keuangan, dan penerimaan pinjaman menimbulkan liabilitas untuk
34 membayar kembali pinjaman tersebut.

35
36 84. Beberapa jenis liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank
37 Indonesia hanya dapat diukur dengan menggunakan estimasi dalam derajat
38 yang substansial. Liabilitas ini disebut sebagai provisi. Jika provisi tersebut
39 terkait dengan kewajiban kini dan memenuhi ketentuan lain dalam definisi
40 liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, maka pos
41 yang bersangkutan merupakan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan
42 Bank Indonesia meskipun jumlahnya harus diestimasi.

1 85. Selisih revaluasi mencerminkan perubahan kumulatif nilai wajar
2 aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak keuangan dari transaksi
3 unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan akhir pelaksanaan
4 transaksi tersebut.

5
6 86. Modal adalah modal Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan
7 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8
9 87. Akumulasi surplus/defisit adalah surplus/defisit yang berasal
10 dari periode berjalan dan periode-periode sebelumnya.

11 **Surplus/Defisit**

12
13
14 88. Unsur laporan surplus/defisit adalah penghasilan dan beban.
15 Pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank Indonesia
16 dipengaruhi oleh penerapan akuntabilitas manajemen Bank Indonesia dalam
17 rangka melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Oleh
18 sebab itu, pengakuan dan pengukuran penghasilan dan beban Bank
19 Indonesia mempertimbangkan konsep kesesuaian dengan upaya pencapaian
20 tujuan Bank Indonesia seperti dijelaskan pada paragraf 43.

21
22 89. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan sebagai berikut.

- 23 (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu
24 periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset
25 atau penurunan liabilitas, yang mengakibatkan kenaikan akumulasi
26 surplus/defisit, yang tidak berasal dari penambahan modal.
27 (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu
28 periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset
29 atau terjadinya liabilitas, yang mengakibatkan penurunan akumulasi
30 surplus/defisit.

31
32 90. Penghasilan dan beban yang memenuhi definisi pada paragraf 89
33 adalah penghasilan dan beban yang berasal dari transaksi yang telah
34 direalisasi dan transaksi unik Bank Indonesia yang telah mencapai tujuan
35 akhir dari pelaksanaan transaksi tersebut.

36
37 91. Definisi penghasilan dan beban mengidentifikasi ciri-ciri
38 esensial tetapi tidak mencoba untuk mengidentifikasi kriteria yang perlu
39 dipenuhi sebelum diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia.
40 Kriteria pengakuan penghasilan dan beban dibahas dalam paragraf 102
41 sampai dengan 123.

42
43 92. Penghasilan dan beban dapat disajikan dalam laporan
44 surplus/defisit Bank Indonesia dengan beberapa cara yang berbeda untuk

1 menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam
 2 hal ini, penghasilan dan beban pada laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 3 dikelompokkan berdasarkan karakteristik khusus Bank Indonesia sebagai
 4 bank sentral.

5
 6 Penghasilan

7
 8 93. Definisi penghasilan (*income*) meliputi pendapatan (*revenues*)
 9 ataupun keuntungan (*gains*). Pendapatan timbul dalam pelaksanaan
 10 aktivitas normal Bank Indonesia, seperti pendapatan bunga dan pendapatan
 11 jasa perbankan.

12
 13 94. Keuntungan mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi
 14 penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam
 15 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia. Keuntungan mencerminkan
 16 kenaikan manfaat ekonomi. Dengan demikian pada hakikatnya keuntungan
 17 tidak berbeda dari pendapatan. Oleh karena itu, pos tersebut tidak
 18 dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar ini.

19
 20 95. Definisi penghasilan dalam laporan surplus/defisit Bank
 21 Indonesia tidak mencakup keuntungan yang belum direalisasi, seperti yang
 22 timbul dari perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia, atau
 23 dampak keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai
 24 tujuan akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

25
 26 96. Keuntungan yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 27 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut
 28 berguna dalam pengambilan keputusan, kecuali tidak material. Keuntungan
 29 dilaporkan dalam jumlah bruto, sebelum dikurangi dengan beban yang
 30 bersangkutan, kecuali tidak material.

31
 32 97. Berbagai jenis aset dapat diterima atau bertambah karena
 33 penghasilan. Penghasilan dapat juga berasal dari penyelesaian liabilitas
 34 lainnya dari kebijakan Bank Indonesia.

35
 36 Beban

37
 38 98. Definisi beban meliputi baik beban yang timbul dalam
 39 pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia ataupun kerugian. Beban
 40 yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas normal Bank Indonesia meliputi,
 41 misalnya, beban pengendalian moneter, beban jasa giro pemerintah, dan
 42 beban gaji. Beban tersebut biasanya berbentuk bertambahnya liabilitas,
 43 seperti giro atau uang dalam peredaran.

1 99. Kerugian mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban
 2 yang mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dari aktivitas normal Bank
 3 Indonesia. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat
 4 ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena
 5 itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dalam prinsip dasar
 6 ini.

7
 8 100. Definisi beban dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 9 tidak mencakup kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari
 10 perubahan nilai wajar aset dan liabilitas Bank Indonesia atau dampak
 11 keuangan dari transaksi unik Bank Indonesia yang belum mencapai tujuan
 12 akhir pelaksanaan transaksi tersebut.

13
 14 101. Kerugian yang diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 15 Indonesia dicantumkan terpisah karena informasi mengenai pos tersebut
 16 berguna dalam pengambilan keputusan. Kerugian dilaporkan dalam jumlah
 17 bruto, sebelum dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan, kecuali
 18 tidak material.

19
 20 **PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

21
 22 102. Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu
 23 pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang
 24 dikemukakan dalam paragraf 103 dalam laporan posisi keuangan atau
 25 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pengakuan dilakukan dengan
 26 menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah
 27 uang, dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau
 28 laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Pos yang memenuhi kriteria
 29 tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan
 30 surplus/defisit Bank Indonesia. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu
 31 tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang
 32 digunakan ataupun melalui catatan atau materi penjelasan.

33
 34 103. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui apabila:
 35 (a) ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos
 36 tersebut akan mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia dan
 37 perekonomian nasional; dan
 38 (b) pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
 39 andal.

40
 41 104. Dalam mengkaji apakah suatu pos memenuhi kriteria ini
 42 sehingga memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan
 43 atau laporan surplus/defisit Bank Indonesia, perhatian perlu ditujukan
 44 pada pertimbangan materialitas yang dibahas dalam paragraf 44 dan 45.

1 Hubungan antara unsur berarti bahwa suatu pos yang memenuhi definisi
 2 dan kriteria pengakuan untuk unsur tertentu, contohnya, suatu aset, secara
 3 otomatis memerlukan pengakuan unsur lain, contohnya, penghasilan atau
 4 liabilitas.

5
 6 **Probabilitas Manfaat Ekonomi Masa Depan dan Kesesuaian Manfaat**
 7 **Ekonomi dengan Upaya Pencapaian Tujuan Bank Indonesia**

8
 9 105. Dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas
 10 digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi
 11 masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke
 12 dalam Bank Indonesia dan perekonomian nasional. Konsep tersebut
 13 dimaksudkan untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi Bank
 14 Indonesia. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus
 15 manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada
 16 saat penyusunan laporan keuangan.

17
 18 106. Dalam kriteria pengakuan penghasilan seperti pada paragraf 103
 19 huruf a, upaya pencapaian tujuan Bank Indonesia dapat memengaruhi
 20 penentuan waktu realisasi transaksi, yaitu saat manfaat ekonomi yang
 21 berkaitan dengan pos tertentu mengalir dari atau ke dalam Bank Indonesia
 22 dan perekonomian nasional. Realisasi transaksi atau mengalirnya manfaat
 23 ekonomi dari atau ke dalam sebuah entitas terjadi ketika tujuan akhir
 24 transaksi telah tercapai. Pada umumnya tujuan akhir transaksi telah
 25 tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, berbagai upaya Bank
 26 Indonesia dapat menyebabkan tujuan akhir transaksi belum tercapai saat
 27 transaksi dilaksanakan. Hal itu disebabkan oleh upaya yang dilakukan
 28 Bank Indonesia dapat dimaksudkan secara langsung atau tidak langsung
 29 memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Jika upaya yang dilakukan Bank
 30 Indonesia dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai
 31 rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi terkait upaya tersebut pada
 32 umumnya telah tercapai saat transaksi dilaksanakan. Namun, jika upaya
 33 yang dilakukan Bank Indonesia tidak dimaksudkan secara langsung
 34 memengaruhi stabilitas nilai rupiah, maka tujuan akhir dari transaksi
 35 terkait upaya tersebut pada umumnya belum tercapai saat transaksi
 36 dilaksanakan.

37
 38 107. Sebagai contoh, Bank Indonesia dapat melakukan transaksi yang
 39 menimbulkan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
 40 berupa kewajiban pembayaran bunga atas penerbitan instrumen utang yang
 41 dilakukan Bank Indonesia dalam memengaruhi jumlah uang beredar.
 42 Transaksi tersebut merupakan konsekuensi kebijakan Bank Indonesia yang
 43 dimaksudkan secara langsung memengaruhi stabilitas nilai rupiah. Oleh
 44 sebab itu, tujuan akhir transaksi telah tercapai pada saat transaksi tersebut

1 dilaksanakan yang bersamaan dengan timbulnya kewajiban pembayaran
2 bunga. Contoh lain, Bank Indonesia dapat melakukan kebijakan transaksi
3 antar valuta asing untuk mempertahankan komposisi cadangan devisa.
4 Komposisi cadangan devisa tersebut menunjang upaya Bank Indonesia
5 dalam mencapai dan memelihara nilai rupiah pada masa yang akan datang.
6 Namun, kebijakan tersebut bersifat jangka panjang sampai tidak lagi
7 merupakan bagian dari komposisi cadangan devisa dan dikonversikan
8 menjadi rupiah. Oleh sebab itu, maksud transaksi antar-valuta asing dalam
9 rangka mempertahankan komposisi cadangan devisa belum mencerminkan
10 tujuan akhir transaksi tersebut. Tujuan akhir transaksi tersebut tercapai
11 ketika cadangan devisa digunakan sebagai instrumen kebijakan dalam
12 memengaruhi nilai rupiah.

13

14 **Keandalan Pengukuran**

15

16 108. Kriteria pengakuan suatu pos yang kedua adalah ada tidaknya
17 biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan (*reliable*)
18 tertentu seperti yang dibahas pada paragraf 47 sampai dengan paragraf 54
19 prinsip dasar ini. Pada banyak kasus, biaya atau nilai harus diestimasi.
20 Penggunaan estimasi yang layak merupakan bagian esensial dalam
21 penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan.
22 Namun, jika estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, pos tersebut
23 tidak diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan surplus/defisit
24 Bank Indonesia. Sebagai contoh, hasil yang diharapkan dari suatu tuntutan
25 hukum dapat memenuhi definisi, baik aset dan penghasilan maupun kriteria
26 probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, jika tidak mungkin
27 diukur dengan tingkat keandalan tertentu, tuntutan tersebut tidak dapat
28 diakui sebagai aset atau sebagai penghasilan. Meskipun demikian,
29 eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan,
30 atau skedul tambahan.

31

32 109. Suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria
33 pengakuan dalam paragraf 103 dapat memenuhi syarat untuk diakui pada
34 masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi
35 kemudian.

36

37 110. Suatu pos yang memiliki karakteristik esensial suatu unsur,
38 tetapi tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan tetap, perlu diungkapkan
39 dalam catatan, materi penjelasan, atau skedul tambahan. Pengungkapan
40 tersebut dapat dibenarkan apabila pengetahuan mengenai pos tersebut
41 dipandang relevan untuk mengevaluasi posisi keuangan dan surplus/defisit
42 Bank Indonesia oleh pengguna laporan keuangan.

1 Pengakuan Aset

2

3 111. Aset diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar
4 kemungkinan bahwa manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh Bank
5 Indonesia dan/atau perekonomian nasional serta aset tersebut mempunyai
6 nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

7

8 112. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan apabila
9 pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi dipandang tidak mungkin
10 mengalir ke dalam Bank Indonesia dan/atau perekonomian nasional setelah
11 periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam itu
12 menimbulkan pengakuan beban dalam laporan surplus/defisit Bank
13 Indonesia. Dengan perlakuan itu, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan
14 manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat
15 ekonomi bagi Bank Indonesia pada masa depan atau bahwa manajemen
16 salah arah. Konsekuensi satu-satunya adalah bahwa tingkat kepastian dari
17 manfaat ekonomi yang diterima Bank Indonesia setelah periode akuntansi
18 berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan pengakuan aset.

19

20 Pengakuan Uang dalam Peredaran

21

22 113. Uang dalam peredaran diakui dalam laporan posisi keuangan
23 sepanjang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan tidak dalam
24 penguasaan Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

25

**26 Pengakuan Liabilitas Lainnya dari Pelaksanaan Kebijakan Bank
27 Indonesia**

28

29 114. Liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
30 diakui dalam laporan posisi keuangan apabila besar kemungkinan akan
31 menimbulkan liabilitas lain pada masa yang akan datang atau akan
32 menimbulkan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat
33 ekonomi pada masa yang akan datang untuk menyelesaikan kewajiban
34 (*obligation*) kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan
35 andal. Dalam praktik, kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan
36 oleh kedua belah pihak pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam
37 laporan keuangan. Namun, kewajiban semacam itu dapat memenuhi definisi
38 liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia, dan apabila
39 dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban
40 tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini,
41 pengakuan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan Bank Indonesia
42 mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan.

1 **Pengakuan Selisih Revaluasi**

2
3 115. Selisih revaluasi diakui apabila terjadi perubahan nilai wajar aset
4 dan liabilitas Bank Indonesia dan/atau perubahan nilai rupiah dari aset dan
5 liabilitas Bank Indonesia dalam valuta asing, dan/atau terjadi keuntungan
6 dan kerugian dari transaksi unik Bank Indonesia yang substansi tujuan
7 ekonominya belum tercapai pada saat transaksi tersebut dilaksanakan,
8 seperti selisih penjabaran mata uang sebagai dampak penyesuaian
9 komposisi aset valuta asing.

10
11 **Pengakuan Modal**

12
13 116. Modal diakui pada saat ditetapkan sesuai dengan peraturan
14 perundang-undangan

15
16 **Pengakuan Penghasilan**

17
18 117. Penghasilan diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
19 apabila kenaikan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan dengan
20 kenaikan aset, penurunan liabilitas lainnya dari pelaksanaan kebijakan
21 Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang mengakibatkan
22 kenaikan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau telah mencapai
23 tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

24
25 118. Prosedur yang lazim dianut dalam praktik untuk mengakui
26 penghasilan, seperti ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh,
27 merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam prinsip dasar ini. Prosedur
28 semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan
29 penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki
30 derajat kepastian yang cukup.

31
32 **Pengakuan Beban**

33
34 119. Beban diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
35 apabila penurunan manfaat ekonomi pada masa depan yang berkaitan
36 dengan penurunan aset, kenaikan liabilitas lainnya dari pelaksanaan
37 kebijakan Bank Indonesia, dan realisasi selisih revaluasi, yang
38 mengakibatkan penurunan akumulasi surplus/defisit, telah terjadi atau
39 telah mencapai tujuan akhir transaksi serta dapat diukur dengan andal.

40
41 120. Prinsip *matching cost against revenue* dalam akuntansi Bank
42 Indonesia tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam
43 akuntansi komersial.

1 121. Beban yang memberikan manfaat lebih dari satu periode
 2 akuntansi dapat diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia atas
 3 dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal itu sering
 4 diperlukan dalam pengakuan beban yang berkaitan dengan penggunaan
 5 aset. Dalam kasus semacam itu, beban itu disebut penyusutan atau
 6 amortisasi. Prosedur alokasi tersebut dimaksudkan untuk mengakui beban
 7 dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang
 8 bersangkutan.

9
 10 122. Beban segera diakui dalam laporan surplus/defisit Bank
 11 Indonesia apabila pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa
 12 depan atau apabila sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak
 13 memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam
 14 laporan posisi keuangan sebagai aset.

15
 16 123. Beban juga diakui dalam laporan surplus/defisit Bank Indonesia
 17 pada saat timbul liabilitas tanpa adanya pengakuan aset.

18
 19 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

20
 21 124. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk
 22 mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan
 23 posisi keuangan dan laporan surplus/defisit Bank Indonesia. Proses itu
 24 menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu untuk mencerminkan
 25 nilai wajar setiap unsur laporan keuangan. Nilai wajar adalah nilai aset yang
 26 dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas yang diselesaikan antara pihak
 27 yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arm's*
 28 *length transaction*).

29
 30 125. Secara konseptual terdapat dua model dasar pengukuran yang
 31 dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia,
 32 yaitu:

- 33 (a) model akuntansi historis (*historical accounting model*); dan
 34 (b) model akuntansi nilai kini (*current value accounting model*).

35
 36 126. Pada model akuntansi historis, pengukuran setiap unsur laporan
 37 keuangan, baik pengukuran awal maupun pengukuran setelah pengakuan
 38 awal, menggunakan nilai wajar pada saat perolehan. Aset dicatat sebesar
 39 pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari
 40 imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut
 41 pada saat perolehan. Liabilitas dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai
 42 penukar dari kewajiban (*obligation*), atau dalam keadaan tertentu, dalam

1 jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk
 2 memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal.

3

4 127. Pada model akuntansi nilai kini, pengukuran setiap unsur
 5 laporan keuangan menggunakan nilai wajar kini. Pada saat pengakuan awal,
 6 nilai wajar kini tersebut tidak berbeda dengan nilai wajar perolehan atau
 7 biaya historis. Namun, setelah pengakuan awal, nilai wajar kini dari unsur
 8 laporan keuangan dapat berbeda dari nilai wajar saat perolehan. Berbagai
 9 dasar pengukuran nilai wajar kini yang dapat digunakan adalah sebagai
 10 berikut.

11 (a) Biaya kini (*current cost* atau *entry price* atau *replacement cost*). Aset
 12 dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar
 13 apabila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas
 14 dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak
 15 didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk
 16 menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

17 (b) Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value* atau *exit price*
 18 atau *selling price*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas)
 19 yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan
 20 normal (*orderly disposal*). Liabilitas dinyatakan sebesar nilai
 21 penyelesaian, yaitu jumlah kas (atau setara kas) yang tidak
 22 didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
 23 liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

24 (c) Nilai sekarang (*present value* atau *discounted present value*). Aset
 25 dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih pada masa depan yang
 26 didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat
 27 memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Liabilitas
 28 dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih pada masa depan yang
 29 didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan
 30 untuk menyelesaikan liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

1 ***Material Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***
2 ***mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara***
3 ***sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi***
4 ***pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran***
5 ***dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam***
6 ***mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran***
7 ***atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya,***
8 ***dapat menjadi faktor penentu.***

9
10 ***Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan***
11 ***kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan,***
12 ***pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok***
13 ***transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap***
14 ***kondisi keuangan BI yang dikeluarkan oleh Komite Penyusun***
15 ***Kebijakan Akuntansi Keuangan BI.***

16
17 ***Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)***
18 ***adalah bangunan kerangka berpikir dalam menentukan antara lain***
19 ***tujuan, unsur, karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta***
20 ***keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BI,***
21 ***termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku***
22 ***umum.***

23
24 ***Standar akuntansi umum (SAU) adalah pernyataan dan interpretasi***
25 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan***
26 ***Akuntan Indonesia.***

27
28 ***Standar akuntansi syariah (SAS) adalah pernyataan dan interpretasi***
29 ***yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan***
30 ***Akuntan Indonesia.***

31
32 04. Penilaian apakah suatu kelalaian untuk mencantumkan atau
33 kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomi
34 pengguna, dan menjadi material, memerlukan pertimbangan karakteristik
35 pengguna tersebut. PDP2LK paragraf 40 menyatakan "Pengguna
36 diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas tujuan BI serta
37 dampaknya terhadap pelaporan keuangan BI, dan memiliki kemampuan
38 untuk mempelajari informasi yang dimaksud". Oleh karena itu, penilaian
39 tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna yang dimaksud
40 diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan
41 dan penilaian atas akuntabilitas BI.

KEBIJAKAN AKUNTANSI**Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi**

05. Jika suatu PKAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PKAK tersebut.

06. PKAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak penerapannya tidak material. Namun, adalah tidak tepat untuk membuat atau membiarkan penyimpangan dari PKAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan dan surplus defisit.

07. PKAK dilengkapi dengan panduan untuk membantu BI dalam menerapkan persyaratan dalam PKAK. Panduan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKAK bersifat wajib diterapkan. Sementara panduan yang bukan bagian tidak terpisahkan dari PKAK tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan.

08. Dalam hal tidak ada PKAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, serta tidak ada SAU dan SAS spesifik yang dapat dirujuk, maka BI menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang:

- a. relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna; dan**
- b. andal, dalam laporan keuangan yang:**
 - i. menyajikan secara jujur posisi keuangan dan surplus defisit;**
 - ii. mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum;**
 - iii. netral, yaitu bebas dari bias;**
 - iv. pertimbangan sehat; dan**
 - v. lengkap dalam semua hal yang material.**

09. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf 08, BI:

- a. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbasis konvensional atau berbasis syariah, dan**

- 1 **b. mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau**
 2 **kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang**
 3 **bersifat unik atau tidak unik, dan**
 4 **c. mempertimbangkan keterterapan dari beberapa sumber yang**
 5 **dijelaskan pada paragraf 10 sampai dengan 13.**

6
 7 **10. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 8 **konvensional dan unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**
 9 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 10 **a. persyaratan dan panduan dalam PKAK yang berhubungan dengan**
 11 **masalah serupa dan terkait;**
 12 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**
 13 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam PDP2LK;**
 14 **c. panduan akuntansi yang digunakan oleh bank sentral lain; dan**
 15 **d. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**
 16 **masalah serupa dan terkait dan dapat mencerminkan tujuan**
 17 **transaksi yang dilakukan oleh BI.**

18
 19 **11. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 20 **konvensional dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-**
 21 **sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 22 **a. persyaratan dan panduan dalam SAU yang berhubungan dengan**
 23 **masalah serupa dan terkait; dan**
 24 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**
 25 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK.**

26
 27 **12. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 28 **syariah dan unik maka BI mempertimbangkan secara komprehensif:**

- 29 **a. tujuan BI;**
 30 **b. substansi ekonomi dan hukum dari transaksi, peristiwa, atau**
 31 **kondisi lain terkait;**
 32 **c. perlakuan akuntansi menurut standar akuntansi atas transaksi,**
 33 **peristiwa, atau kondisi lain yang sejenis pada entitas lain;**
 34 **d. prinsip-prinsip akuntansi syariah yang diterima umum; dan**
 35 **pendapat pihak yang berwenang untuk menilai transaksi syariah.**

36
 37 **13. Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat**
 38 **syariah dan tidak unik maka BI mempertimbangkan sumber-sumber**
 39 **berikut ini sesuai dengan urutan menurun:**

- 40 **a. persyaratan dan panduan dalam SAS yang berhubungan dengan**
 41 **masalah serupa dan terkait**

- 1 **b. definisi, kriteria pengakuan, serta konsep pengukuran untuk aset,**
 2 **liabilitas, penghasilan, dan beban dalam KDP2LK Syariah; dan**
 3 **c. persyaratan dan panduan dalam SAU yang sesuai dengan SAS,**
 4 **yang berhubungan dengan masalah serupa.**

5
 6 **14. Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf**
 7 **08, BI juga mempertimbangkan standar akuntansi terkini yang**
 8 **dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain, literatur**
 9 **akuntansi lain, sepanjang tidak bertentangan dengan sumber di**
 10 **paragraf 10 sampai dengan 13.**

11
 12 **Konsistensi Kebijakan Akuntansi**

13
 14 **15. BI memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi keuangan**
 15 **secara konsisten untuk transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang**
 16 **serupa, kecuali suatu PKAK secara spesifik mengatur atau**
 17 **mengizinkan pengelompokan pos-pos dengan kebijakan akuntansi**
 18 **yang berbeda adalah hal yang tepat. Jika suatu PKAK mengatur atau**
 19 **mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi**
 20 **yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap**
 21 **kelompok.**

22
 23 **KETENTUAN TRANSISI**

24
 25 16. Pernyataan ini berlaku secara prospektif.

26
 27 **TANGGAL EFEKTIF**

28
 29 17. Pernyataan ini berlaku mulai tanggal yang ditetapkan dalam
 30 Peraturan Dewan Gubernur BI.

Sekretariat Komite Penyusun KAKBI

Bank Indonesia, Gedung C, Lantai 10,
Jl. MH Thamrin, No.2, Jakarta Pusat, 10350
Telepon: 021-29817018 / 29817150; Fax: 021-34830210,
Email: kpkakbi@bi.go.id